



LAKjIP 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada akhirnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan ini disusun dengan mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023–2026 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati Bolaang Mongondow atas amanah yang telah diberikan dalam urusan wajib ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Isi laporan ini menggambarkan sejauh mana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow sepanjang tahun 2025.

Semoga program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 dapat meningkatkan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum melalui penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang pada akhirnya bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai upaya penyempurnaan di masa mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum bagi daerah tercinta Kabupaten Bolaang Mongondow.

Lolak, Februari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



ZULFADLI BINOL, SE. ME
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19691011 200701 1 016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar/ Grafik	iv
Bab I	
Pendahhuluan	1
A. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow	1
B. Aspek Strategis Organisasi	3
C. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow	6
Bab II	
Perencanaan Kinerja	10
A. Perencanaan Strategis	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	16
D. Rencana Kerja Tahunan	17
Bab III	
Akuntabilitas Kinerja	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	39
Bab IV	
Penutup	47
A. Tinjauan Umum	47
B. Permasalahan dan Strategi Pemecahannya	48
Lampiran – lampiran	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	15
Tabel 2.2.	Revisi Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ...	16
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
Tabel 2.4.	Rencana Kinerja Tahunan	17
Tabel 3.1	Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti Tahun 2025	21
Tabel 3.2.	Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Kinerja Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti tahun 2024 dan Tahun 2025	22
Tabel 3.3.	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti	23
Tabel 3.4.	Membandingkan realisasi kinerja Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti tahun 2025 dengan Provinsi dan Nasional	24
Tabel 3.5.	Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Presentasi Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani Tahun 2025	26
Tabel 3.6.	Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang tertangani tahun sebelumnya dan Tahun 2025.....	27
Tabel 3.7.	Realisasi dan Capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	28
Tabel 3.8	Membandingkan Realisasi Kinerja Presentasi Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani Tahun 2025 Dengan Standar Nasional	30
Tabel 3.9.	Perbandingan target dan capaian realisasi kinerja Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani tahun 2025	33
Tabel 3.10.	Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Jumlah Armada Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Capaian Realisasi Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani tahun sebelumnya dan Tahun 2025	34
Tabel 3.11.	Membandingkan realisasi kinerja berdasarkan persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani tahun 2025 dengan Provinsi dan standar nasional	36
Tabel 3.12	Perbandingan persentase realisasi anggaran tahun 2024 dan tahun 2025	39
Tabel 3.13.	Capaian realisasi anggaran belanja tahun tahun 2025	40
Tabel 3.14.	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025	42

DAFTAR GAMBAR / GRAFIK

Gambar 1.	Struktur Organisasi SatPol PP	2
Grafik 1.	Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Kinerja Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti pada Tahun 2025	21
Grafik 2.	Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Kinerja Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti tahun 2024 dan Tahun 2025	22
Grafik 3.	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra	24
Grafik 4.	Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Presentasi Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani Tahun 2025	26
Grafik 5.	Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang tertangani tahun sebelumnya dan Tahun 2025.....	27
Grafik 6.	Realisasi dan Capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	29
Grafik 7.	Realisasi dan Capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	29
Grafik 8..	Perbandingan target dan capaian realisasi kinerja Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani tahun 2025	33
Grafik 9.	Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani tahun 2025	34
Grafik 10.	Capaian realisasi dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra pada indicator jumlah armada pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan indicator Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani	36

BAB I

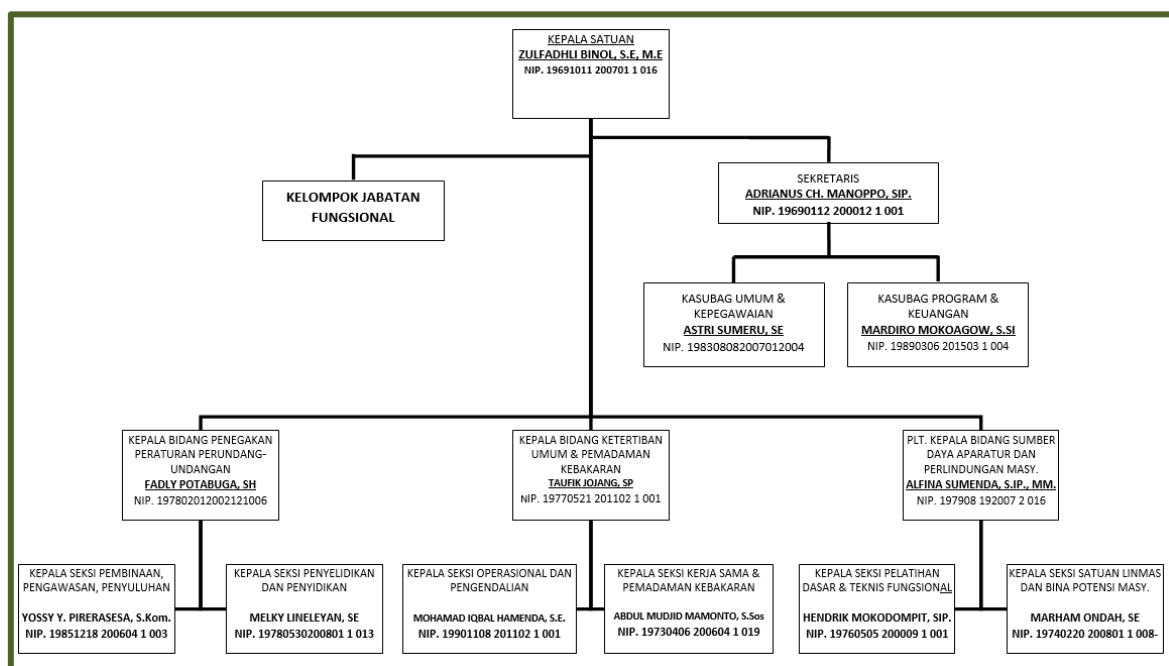
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolmong, maka struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari :

- a) Kepala Satuan;
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 - i. Sekretaris;
 - ii. Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - iii. Kepala Sub-Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan.
- c) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari:
 - i. Kepala Bidang;
 - ii. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan;
 - iii. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- d) Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
 - i. Kepala Bidang;
 - ii. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - iii. Seksi Kerja Sama dan Pemadam Kebakaran.
- e) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, dari terdiri dari:
 - i. Kepala Bidang;
 - ii. Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional;
 - iii. Kepala Seksi Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat.

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Gambar 1. Struktur Organisasi Satpol PP

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) orang dan THL/Tenaga Kontrak 28 (dua puluh delapan) orang terdiri dari :

- Eselon II B : 1 (satu) orang
- Eselon III A : 1 (satu) orang
- Eselon III B : 3 (tiga) orang
- Eselon IV A : 8 (delapan) orang
- Kelopak Jabatan Fungsional : - (belum ada)
- Staf/Pelaksana : 15 (dua belas) orang
- PPPK : 35 (dua puluh) orang
- THL/Tenaga Kontrak : 28 (dua puluh delapan) orang :

Jumlah : 92 (sembilan puluh dua) orang

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025–2029, visi pembangunan daerah adalah “Bolaang Mongondow Maju dan Sejahtera”, dengan salah satu misinya “Menjadikan Kehidupan Masyarakat Lebih Harmonis dan Toleran”. Melalui tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi garda terdepan dalam mendukung pencapaian misi tersebut.

Kondisi dan potensi yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, khususnya dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif. Dalam menjalankan peran strategis tersebut, Satpol PP dipengaruhi oleh berbagai aspek lingkungan strategik, baik internal maupun eksternal, sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

○ Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per 31 Desember 2025, Satpol PP didukung oleh 64 Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari 28 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 36 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta 28 Tenaga Harian Lepas (THL). Ketersediaan personel yang cukup memadai menjadi modal utama dalam melaksanakan patroli, penegakan Peraturan Daerah (Perda), serta penanganan kebakaran dan penyelamatan. Namun demikian, tantangan masih terdapat pada pemerataan kompetensi, terutama di bidang teknis pemadaman kebakaran dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

○ Sarana dan Prasarana

Aset yang dimiliki antara lain kendaraan operasional, alat pemadam kebakaran, perlengkapan SAR, serta peralatan komunikasi. Berdasarkan data aset tahun 2025, sebagian armada pemadam kebakaran telah diperbarui

melalui belanja modal. Meski demikian, masih diperlukan penambahan pos pemadam kebakaran di wilayah yang jauh dari pusat kota untuk memenuhi standar waktu tanggap (respon time) 15 menit.

- **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 memungkinkan pembagian tugas yang jelas antara sekretariat, bidang penegakan Perda, bidang ketertiban umum, dan bidang perlindungan masyarakat. Hal ini mendukung efektivitas koordinasi internal.

2. Lingkungan Eksternal

- **Kondisi Geografis**

Kabupaten Bolaang Mongondow terletak di jazirah Pulau Sulawesi bagian utara pada posisi 123°–124° BT dan 00°30'–1°00' LU. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di sebelah barat, Kabupaten Minahasa Selatan di timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di selatan. Topografi didominasi oleh pegunungan dengan ketinggian bervariasi antara 0–2.000 mdpl, serta beriklim tropis dengan curah hujan 2.000–3.000 mm/tahun. Kondisi geografis yang luas dan berbukit menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal waktu tanggap penanganan kebakaran dan penyelamatan. Jarak tempuh yang jauh ke lokasi kejadian, khususnya di kecamatan-kecamatan wilayah timur dan selatan, memerlukan strategi penempatan pos pemadam kebakaran yang tepat serta kerja sama lintas daerah, seperti yang telah dijalin dengan Pemerintah Kota Kotamobagu. Di sisi lain, sarana transportasi jalan darat antara ibu kota kabupaten ke ibu kota provinsi maupun ke seluruh kecamatan tergolong lancar, sehingga memudahkan mobilitas personel dan peralatan dalam rangka patroli, pengamanan, dan penegakan Perda.

- **Kondisi Kependudukan**

Jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan peningkatan dengan laju pertumbuhan yang lambat, diiringi pergeseran

struktur umur menuju penduduk tua. Kepadatan penduduk yang tidak merata antar kecamatan berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, seperti konflik sosial, pelanggaran Perda, dan peningkatan risiko kebakaran di permukiman padat. Di samping itu, tingkat pendidikan dan pendapatan penduduk yang masih relatif rendah dapat menjadi hambatan dalam upaya sosialisasi dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP perlu merancang strategi komunikasi yang tepat sasaran, termasuk melibatkan Satuan Linmas di tingkat desa/kelurahan sebagai ujung tombak deteksi dini gangguan ketertiban.

- **Kondisi Sosial Politik**

Perubahan peta politik nasional telah membuka ruang demokrasi yang lebih luas. Dinamika dan aspirasi masyarakat, termasuk unjuk rasa, menuntut Satpol PP untuk tidak lagi mengandalkan pendekatan represif, melainkan beralih pada paradigma humanis, persuasif, dan partisipatif. Peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pengembangan sistem pengaduan dan respons cepat menjadi keniscayaan untuk menjawab dinamika sosial politik yang terus berkembang.

- **Kondisi Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan yang tidak diimbangi pemerataan berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial yang dapat memicu gangguan ketertiban seperti premanisme, pencurian, dan konflik horizontal. Peningkatan aktivitas ekonomi, termasuk menjamurnya UMKM dan investasi, membawa konsekuensi perlunya penegakan Perda yang konsisten, terutama terkait perizinan usaha, ketertiban pasar, dan reklame. Satpol PP berperan penting dalam menciptakan iklim usaha kondusif melalui pengawasan dan penertiban yang humanis dan persuasif, sehingga investasi dapat tumbuh tanpa mengabaikan ketertiban umum dan kelestarian lingkungan.

- **Kerja Sama Lintas Daerah**

Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kota Kotamobagu (Nomor 130.4/05/Kes-Ber/2024 dan Nomor 120/PEM-KK/KB/IX/2024) serta Perjanjian Kerja Sama (Nomor 130.4/03/PKS/2024 dan Nomor 045/PEM-KK/PKS/IX/2024) di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat memperkuat sinergi penanganan kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan. Kerja sama ini menjadi peluang strategis untuk berbagi sumber daya, saling mendukung, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek strategis tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, responsivitas, dan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib, dan toleran sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025–2029..

C. PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow selama tahun 2025, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi isu strategis dan mempengaruhi optimalisasi kinerja organisasi. Identifikasi permasalahan ini didasarkan pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta analisis terhadap faktor-faktor penghambat pencapaian target kinerja. Adapun permasalahan utama beserta solusi yang telah dan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan

a. Terbatasnya Jumlah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dari aspek kuantitas, jumlah personel Satpol PP yang ideal sesuai analisis beban kerja belum sepenuhnya terpenuhi, terutama untuk personel di lapangan yang melaksanakan patroli, penegakan Perda, dan pemadaman kebakaran. Meskipun telah ada penambahan PPPK dan tenaga kontrak, rasio personel terhadap luas wilayah dan jumlah penduduk masih belum optimal.

Dari aspek kualitas, belum meratanya kompetensi teknis personel, khususnya di bidang pemadaman kebakaran (rescue dan evakuasi), penyidikan oleh PPNS, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan dan pengaduan masyarakat.

b. Belum Optimalnya Landasan Hukum untuk Beberapa Objek Penertiban

Terdapat objek penertiban yang belum secara jelas diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum di lapangan. Hal ini menyebabkan adanya potensi tumpang tindih kewenangan atau ketidakpastian dalam tindakan penertiban.

c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

▪ Ruang Kerja

Kantor Satpol PP masih menempati ruangan yang relatif terbatas dan belum representatif (pinjam pakai), sehingga kurang kondusif untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran dan koordinasi antar bidang.

▪ Sarana Operasional Lapangan

Ketersediaan kendaraan operasional roda empat dan roda dua masih terbatas, sementara usia pakai beberapa unit sudah tua. Hal ini berdampak pada mobilitas personel dalam merespons gangguan ketertiban dan kejadian kebakaran, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota. Selain itu, perlengkapan pemadam kebakaran seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan rescue juga perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya sesuai standar nasional.

▪ Pos Pemadam Kebakaran

Belum tersedianya pos pemadam kebakaran di beberapa Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang strategis menyebabkan waktu tanggap (respon time) di beberapa kecamatan melebihi standar 15 menit.

d. Minimnya Pagu Anggaran Operasional

Pagu anggaran yang tersedia setiap tahun masih belum sepenuhnya mencukupi untuk mengakomodir seluruh program dan kegiatan yang direncanakan, terutama yang bersifat prioritas dan berkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Keterbatasan anggaran ini berdampak

pada optimalisasi pelaksanaan patroli, sosialisasi Perda, pelatihan personel, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

2. Solusi

a. Peningkatan Kompetensi Personel melalui Pendidikan dan Pelatihan

Mengikutsertakan personel Satpol PP dalam pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun lembaga pelatihan lainnya. Pelatihan difokuskan pada bidang teknis pemadaman kebakaran (rescue dan evakuasi), penanganan gangguan ketertiban, penyidikan PPNS, serta penguasaan teknologi informasi untuk mendukung sistem pelaporan dan pengaduan.

b. Penambahan Personel, Khususnya PPNS

Mengusulkan penambahan formasi personel, terutama untuk jabatan fungsional PPNS, baik melalui rekrutmen ASN baru maupun mutasi dari instansi lain. Selain itu, mendorong personel yang ada untuk mengikuti Diklat PPNS guna memperkuat kapasitas penegakan hukum di daerah.

c. Percepatan Penyusunan dan Revisi Peraturan Daerah

Berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda dan DPRD untuk mempercepat penyusunan, revisi, atau harmonisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum. Hal ini bertujuan untuk memperkuat landasan hukum bagi pelaksanaan penertiban dan penegakan Perda.

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor serta Operasional Lapangan

- Mengusulkan pembangunan gedung kantor yang representatif untuk mendukung kelancaran administrasi dan koordinasi internal.
- Melakukan pengadaan kendaraan operasional baru serta peremajaan kendaraan yang sudah tua, baik roda empat maupun roda dua.
- Menambah perlengkapan pemadam kebakaran dan APD sesuai standar teknis, serta membangun pos pemadam kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran yang belum terlayani.
- Memanfaatkan kerja sama lintas daerah dengan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk saling mendukung dalam penanganan kebakaran di wilayah perbatasan.

e. Optimalisasi dan Usulan Penambahan Pagu Anggaran

- Menyusun usulan kebutuhan anggaran secara lebih terukur dan berbasis prioritas, dengan mengacu pada Renstra 2025–2029, target IKU, dan pemenuhan SPM. Usulan penambahan pagu anggaran disampaikan secara berkelanjutan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui pembahasan KUA-PPAS setiap tahunnya.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang ada, serta mengoptimalkan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, termasuk kemitraan dengan dunia usaha melalui program CSR.

Dengan mengidentifikasi permasalahan secara lebih spesifik dan merumuskan solusi yang terarah, diharapkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow dapat terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib, dan aman.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Adapun maksud dan tujuan untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023–2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2005-2025 adalah untuk mewujudkan :

**“Bolaang Mongondow yang baru, berbudaya, berdaya saing dan Mandiri
Sebagai Lumbung Pangan Indonesia Timur”**

Dengan penjelasan sebagai berikut yaitu:

- **Bolaang Mongondow yang Baru:** berarti terwujudnya masyarakat Bolaang Mongondow yang baru secara administrasi dimana sudah melaksanakan pemekaran sehingga menjadi 4 kabupaten dan 1 Kota dan pada suatu saat akan kembali bergabung menjadi satu bagian menjadi Propinsi Bolaang Mongondow.
- **Bolaang Mongondow yang Berbudaya:** berarti terwujudnya masyarakat Bolaang Mongondow yang tetap memegang teguh kearifan lokal dengan prinsip Mototabian, mototanoban yang tercermin dalam budaya moposat. Masyarakat Bolaang Mongondow memiliki karakter yang mampu menerima dan mengadopsi budaya modern yang konstruktif, agamais, berkeadilan serta berkepribadian/berjati diri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan, dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.
- **Bolaang Mongondow yang berdaya saing:** berarti terwujudnya seluruh masyarakat Bolaang Mongondow yang sehat, cerdas untuk menjadi unggul di segala bidang, serta mampu berperan dalam pembangunan nasional maupun internasional. Berdaya saing disini juga berarti Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi kabupaten yang memiliki kemampuan untuk menjadi terdepan dalam hal kemampuan menghasilkan produksi lokal dengan kualitas internasional.
- **Bolaang Mongondow yang mandiri :** berarti merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan, dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak tujuan pembangunan lainnya, yang pada gilirannya akan mewujudkan masyarakat Bolaang mongondow yang memiliki penghidupan yang layak, bebas dari segala macam gangguan agar

dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa, dan makmur.

- Ukuran **Lambung Pangan** ditunjukkan oleh meningkatnya kemampuan produksi dari segala sumber daya ekonomi dan sosial budaya seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, perdagangan, tenaga kerja, dan pariwisata. Hal ini dapat diukur melalui bertambahnya nilai produksi dari sumber daya ekonomi dan sosial budaya tersebut. Sehingga mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow kedepan.

Visi tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) misi yaitu:

1. Mewujudkan Bolaang Mongondow yang berbudaya dan berdaya saing.

Misi pertama ini ditunjukkan dengan upaya pemerintah dan Masyarakat Bolaang Mongondow untuk melaksanakan pembangunan menjadikan sumberdaya manusia sebagai subjek pembangunan, mendidik sumberdaya manusia Bolaang Mongondow yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kualitas dan integritas serta berperikemanusiaan, memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tanpa meninggalkan kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang Bolaang Mongondow, memiliki derajat kesehatan yang tinggi sehingga memenuhi syarat maupun prasyarat masyarakat intelektual yang bermartabat. Pada gilirannya dengan kemampuan moral, etika, dan intelektual, masyarakat Bolaang Mongondow mampu memproduksi barang dan jasa, serta usaha-usaha lainnya yang dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat dan daerah.

2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Misi kedua ini ditunjukkan dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat yang mampu melaksanakan menyediakan dan memantapkan kondisi infrastruktur dasar sebagai salah satu syarat dan prasyarat pembangunan bangsa. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas yang mampu memenuhi standar pelayanan minimal sehingga dapat menjadi alat dalam mencapai kemakmuran bersama. Dengan adanya pelayanan pemerintahan yang secara koordinatif mampu melakukan kontrol yang efektif terhadap pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana baik infrastruktur

dasar, suprastruktur dan manajemen pembangunan dengan mempertahankan keseimbangan aspek pemanfaatan sumberdaya alam sebagai modal utama dalam sistem pembangunan berkelanjutan yang mampu menekan efek climate change.

Pembangunan Sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan/pemukiman dan lingkungan serta infrastruktur keagamaan menjadi alat dalam mendorong kemampuan daerah menjadi mandiri dan berdayasaing.

3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal.

Misi ketiga ini ditunjukkan dengan pembangunan ekonomi daerah dari segala sektor ekonomi dalam rangka mencapai peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terutama dari usaha perekonomian yang berbasis sumberdaya alam baik didarat maupun di laut, dengan memanfaatkan semua potensi sumberdaya alam yang ada, membangun kondisi iklim investasi yang baik dengan proses pembangunan yang berlandaskan pada pengelolaan sumber daya alam demi kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat atau kelompok dengan berbagai bantuan modal maupun pelatihan. Selain itu melaksanakan pengembangan kawasan sentra ekonomi ataupun semacamnya guna meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.

Dalam kemandiriannya suatu daerah dapat terlihat dengan besaran pendapatan perkapita, Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, serta prosentase dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemandirian juga dapat terlihat dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan Kesehatan dan Pendidikan tanpa harus lagi keluar daerah dalam mendapatkan pelayanan.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bebas KKN.

Misi keempat ini ditunjukkan dengan upaya melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governace), terjaminnya penegakan hukum terhadap praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang didukung oleh lembaga legislatif daerah yang kuat serta legitimasi penuh masyarakat. Pemerintahan daerah yang baik, bersih dan demokratis adalah daerah yang aman dan damai karena warganya taat dan patuh terhadap hukum di satu sisi, dan di sisi lain, hak-hak masyarakat terlindungi dan terakomodasi dalam sistem sosial, ekonomi, politik, pemerintahan dan pembangunan.

5. Mewujudkan Bolaang Mongondow Sebagai Lumbung Pangan di Indonesia Bagian Timur.

Misi kelima ini ditunjukkan dengan upaya mengerahkan fokus pembangunan kabupaten Bolaang Mongondow dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan untuk menjadikan Kabupaten ini sebagai lumbung pangan di Indonesia Bagian Timur.

Maka berdasarkan Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tersebut, ditetapkanlah 3 (Tiga) misi dan 4 (Empat) tujuan pembangunan selama 4 tahun ke depan sebagai berikut:

MISI:

1. Meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat;
2. Mewujudkan penegakan peraturan daerah secara konsisten dan kontinyu;
3. Meningkatkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta penyelamatan lainnya kepada masyarakat.

TUJUAN:

- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.

INDIKATOR TUJUAN :

1. Persentasi Kasus pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti;
2. Persentasi Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani;
3. Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani.

SASARAN :

1. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah;
2. Meningkatnya peran Anggota Satlinmas dalam penegakan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pencegahan bahaya kebakaran.

INDIKATOR SASARAN :

1. Persentasi Kasus pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti;
2. Persentasi Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani;
3. Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2025	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PADA TAHUN 2026
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Persentasi Kasus pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti	80%	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti	90%
		Persentasi Gangguan Trantibumlinas yang Tertangani	80%	Meningkatnya peran Anggota Satlinmas dalam penegakan ketenteraman dan ketertiban umum	Presentasi Gangguan Trantibumlinas yang Tertangani	90%
		Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani	80%	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani	90%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai tindak lanjut komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023-2026, maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Bupati Bolaang Mongondow dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

REVISI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025

Tabel 2.2. Revisi Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target	Program Pendukung	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perda	Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti	80%	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	53.872.857
2.	Meningkatnya Peran Satlinmas dalam Penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentasi Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani	80%	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	116.858.538
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani	80%	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non-kebakaran	68.674.128
JUMLAH					239.405.523

Gambaran secara utuh mengenai Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025, termasuk dokumen revisi perubahannya, tercantum pada lampiran dokumen LKjIP ini..

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULASI INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perda	Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yang Tertangani}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda}} \times 100$	80%
2.	Meningkatnya Peran Satlinmas dalam Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentasi Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani	$\frac{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang Tertangani}}{\text{Jumlah Kasus Gangguan Trantibum}} \times 100$	80 %
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani}}{\text{Jumlah Kasus Kebakaran}} \times 100$	80 %

D. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran atau turunan dari dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra). RKT TA. 2025 ini juga merupakan gambaran kegiatan dan output Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2025. Untuk lebih jelasnya Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4. Rencana Kinerja Tahunan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET
1.	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perda	Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti	80%
2.	Meningkatnya Peran Satlinmas dalam Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentasi Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani	80%
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani	80 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauh mana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Satuan Polisi Pmong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran tahun 2025. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2023 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a) Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- b) Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

>85	=	Sangat berhasil
$70 < X \leq 85$	=	Berhasil
$55 < X \leq 70$	=	Cukup Berhasil
≤ 55	=	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut

dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai *mean* (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{Nilai } \textit{mean} \text{ setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

Nilai *Mean* setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Sangat Berhasil	:	92,5
Berhasil	:	77,5
Cukup Berhasil	:	62,5
Tidak Berhasil	:	27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori *sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil*, dan *tidak berhasil*.

2. Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran

Pengukuran capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan di-komitmen-kan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Penegakan Peraturan Perda

Bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah yang mengatur tentang *Pajak Reklame, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan* dan *Retribusi Pelayanan Pasar* merupakan kewenangan kabupaten untuk melakukan pungutan pajak.

Pengukuran capaian kinerja sasaran; “Meningkatnya Penegakan Peraturan Perda” dengan indikator sasaran “Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti” dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yang Tertangani 7 Pelanggaran}}{\text{Pelanggaran Perda 7 Pelanggaran}} \times 100$$

Pada tahun 2025 di Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat 7 (tujuh) kasus pelanggaran perda/perkada dan semuanya telah ditindaklanjuti.

1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Adapun capaian indikator Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti pada tahun 2025, dapat kita lihat pada table berikut

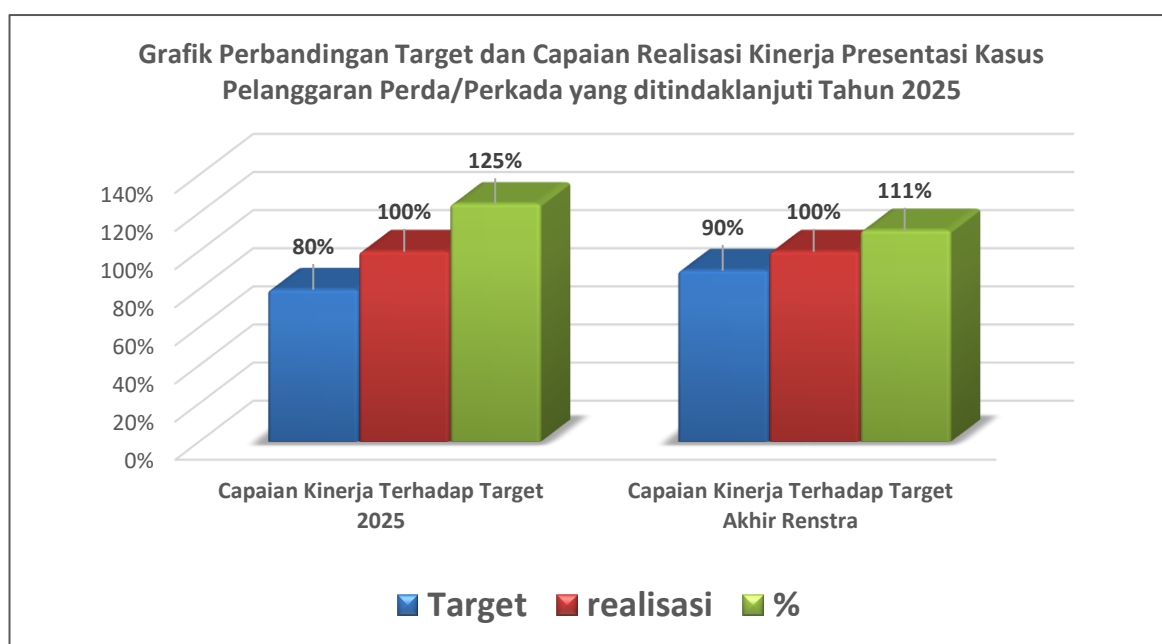
Tabel 3.1. Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti Tahun 2025

Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2024			Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%	90%	100%	111%

Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 terhadap target sebesar 80% terealisasi sebesar 100% atau 125% dari target. Dan jika dibandingkan dengan target pada akhir renstra yaitu 90% maka capaian realisasi mencapai 111%.

Adapun perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 1. Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Kinerja Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti pada Tahun 2025



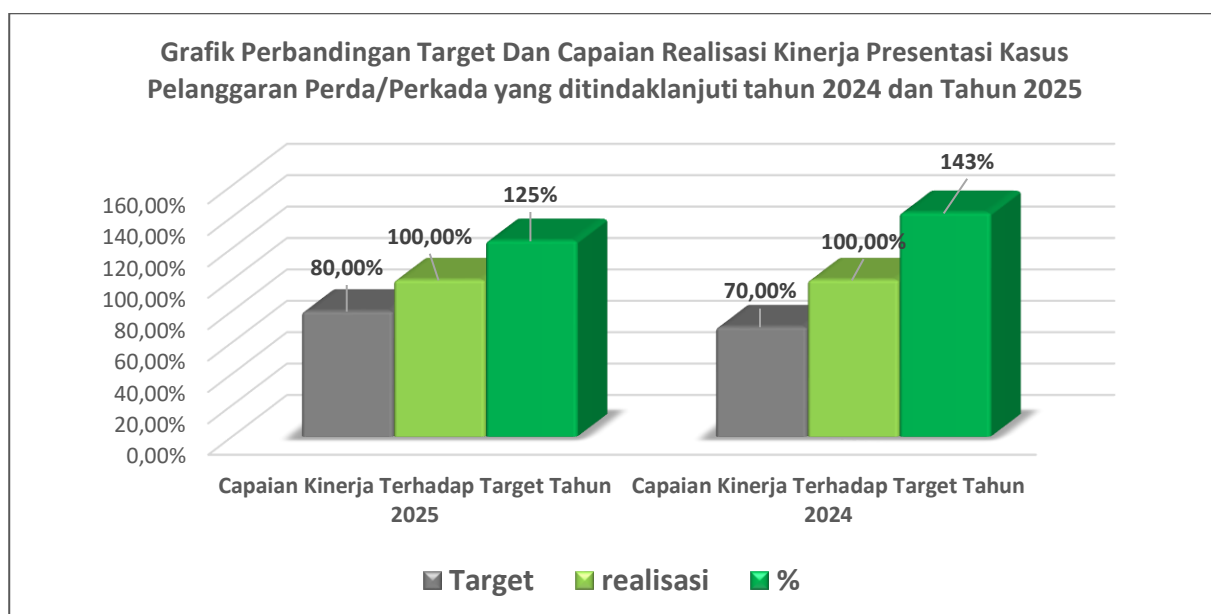
1.2 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Kinerja Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024			Capaian Kinerja Tahun 2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti	70%	100%	143%	80%	100%	125%

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa Perbandingan Target dan Capaian Realisasi tahun 2024 dan Tahun 2025. Pengukuran terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024 dari target 70% terealisasi sebesar 100% dengan persentasi capaian sebesar 143% sedangkan pada tahun 2025 dari target 80% terealisasi sebesar 100% dengan persentasi capaian sebesar 125%. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2. Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Kinerja Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti tahun 2024 dan Tahun 2025



1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti.

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Cakupan Penegakan Perda	90%	105,26%			-	-	-	-	-	-
Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti	-	-	167%	143%	80%	100%	125%	90%	100%	111%

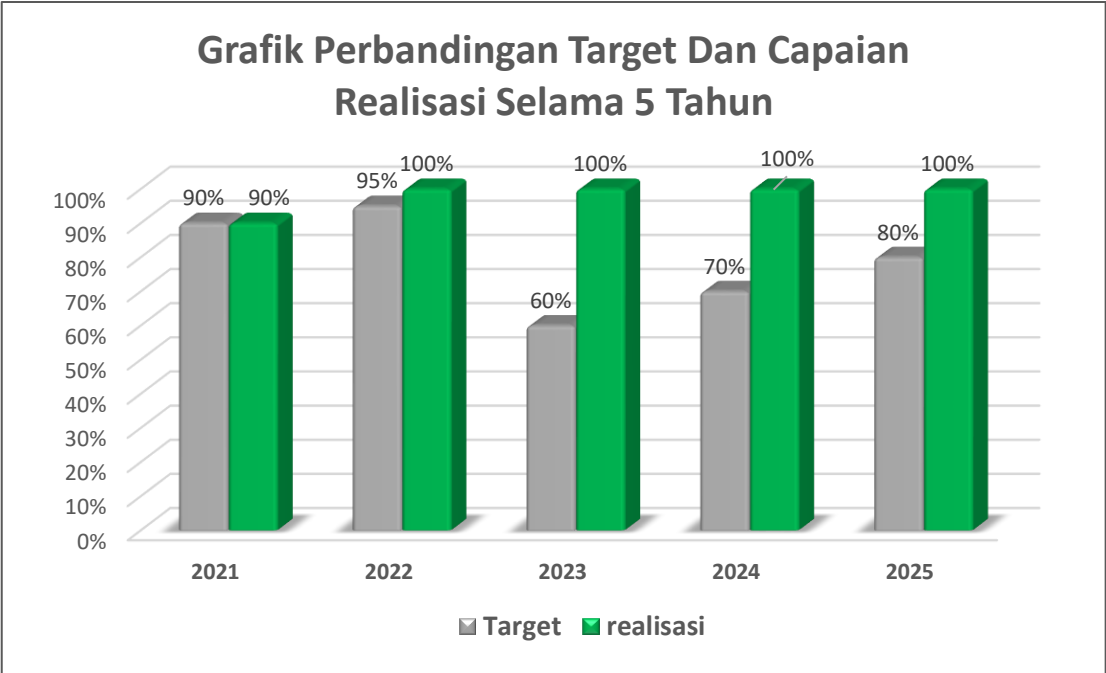
Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja untuk Persentase Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang Ditindaklanjuti telah menunjukkan tren capaian yang sangat positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, capaian kinerja mencapai 167% dari target yang ditetapkan, dan pada tahun 2024 kembali menunjukkan kinerja tinggi dengan capaian 143%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2025, di mana dengan target sebesar 80% (sesuai Renstra 2023–2026 dan SK IKU 2025), realisasi mencapai 100%, sehingga persentase capaian kinerja dari target adalah sebesar 125%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Satpol PP Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023–2026, yaitu sebesar 90% untuk indikator ini, maka realisasi tahun 2025 sebesar 100% telah melampaui target akhir periode Renstra, dengan capaian sebesar 111%.

Capaian kinerja yang konsisten di atas 100% ini menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow berjalan sangat efektif. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, optimalnya koordinasi antar instansi, serta efektivitas kegiatan preventif dan represif yang dilaksanakan oleh Satpol PP.

Berdasarkan skala pengukuran kinerja yang digunakan (dengan kategori Sangat Berhasil >85%), capaian pada indikator ini masuk dalam kategori "SANGAT BERHASIL". Perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun tersebut dapat dilihat secara visual pada grafik di bawah ini.:

Grafik 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.



1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.4 Membandingkan realisasi kinerja Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti tahun 2025 dengan Provinsi dan Nasional

Indikator	Kabupaten	Provinsi	Nasional
Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti	100%	100%	N/A

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dilihat bahwa perbandingan diatas dapat dilihat bahwa persentasi realisasi Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 sebesar 100%, Provinsi Sulawesi Utara sebesar 100%, sedangkan untuk nasional tidak tersedia.

1.5 Analisis penyebab keberhasilan alternative solusi yang telah dilakukan

Adapun penyebab keberhasilan atas capaian kinerja Indikator Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti adalah:

Faktor Keberhasilan :

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti pada tahun 2025

menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap penegakan Perda di Kabupaten Bolaang Mongondow semakin baik. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat maupun badan usaha terhadap kewajiban mematuhi dan menjalankan perda semakin tinggi. Selain itu kerjasama dan kolaborasi antar organisasi perangkat daerah semakin baik dengan senantiasa melakukan koordinasi dalam hal penegakan perda.

1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan sasaran indikator Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.

Tingkat Efisiensi pada Presentasi Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti mencapai 0,97% angka ini didapat dari pencapaian persentase dari realisasi kinerja terealisasi sebesar 100% sedangkan untuk realisasi anggaran terealisasi sebesar 99,03%.

1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Guna menunjang keberhasilan atas pencapaian sasaran pada indikator Persentase Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang Ditindaklanjuti pada tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow telah menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp170.731.395,00 dan realisasi sebesar Rp169.768.545,00 atau mencapai 99,44%.
- b. Kegiatan yang secara langsung mendukung indikator ini adalah Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) dengan anggaran sebesar Rp53.872.857,00 dan realisasi sebesar Rp53.352.855,00 atau mencapai 99,03%.

Dengan realisasi anggaran yang sangat optimal (di atas 99%) dan capaian kinerja yang melampaui target (100% dari target 80%), menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif dan efisien dalam mendukung penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Satlinmas dalam Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pengukuran capaian kinerja sasaran; “Meningkatnya Peran Satlinmas dalam Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum“ dengan indikator “Presentasi Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani” dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Presentasi Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani} = \frac{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang Tertangani 9 Kasus}}{\text{Jumlah Kasus Gangguan Trantibum 9 Kasus}} \times 100$$

Adapun capaian indikator Presentasi Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani pada tahun 2025 terjadi 9 (Sembilan) kasus gangguan trantibum dan semuanya dapat ditangani, dapat kita lihat pada tabel berikut :

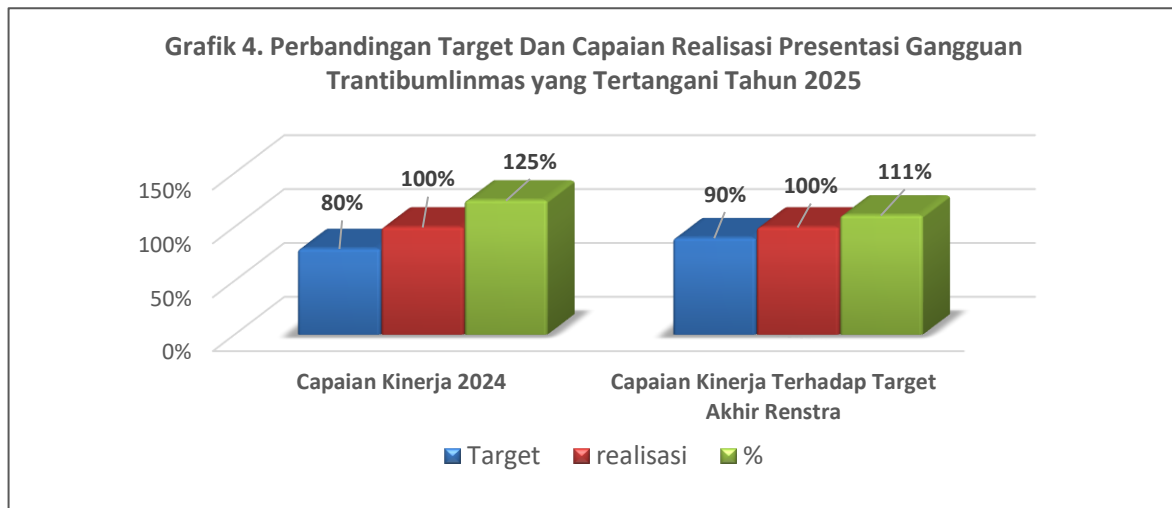
2.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Presentasi Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani Tahun 2025

Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Presentasi Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani	80%	100%	125%	90%	100%	111%

Berdasarkan Tabel 3.4. diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan target capaian kinerja tahun 20235 yaitu 80% terealisasi sebesar 100% atau 125% dari target kasus Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani dengan perbandingan target dan realisasi capaian kinerja tahun 2025 dan capaian kinerja terhadap target akhir renstra sebesar 90% atau 111% persen yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 4. Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Presentasi Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani Tahun 2025



2.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

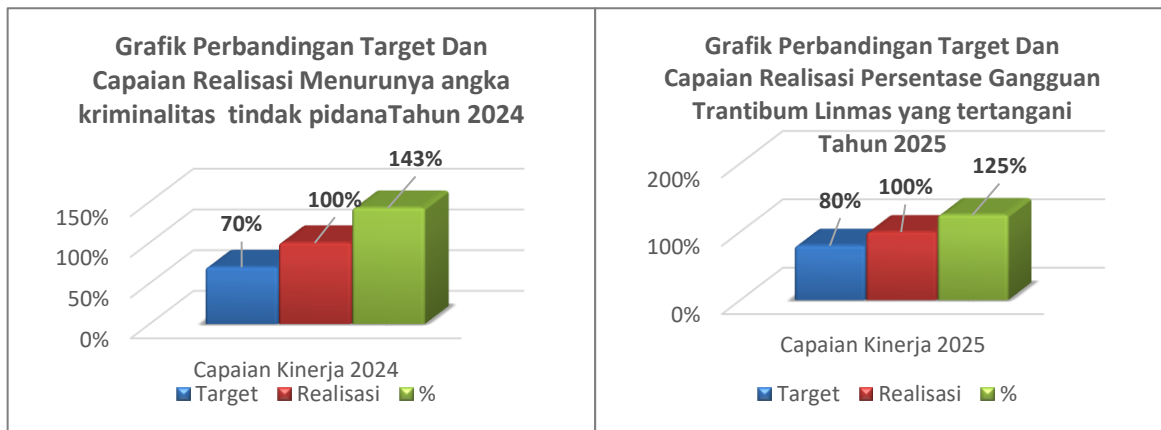
Perbandingan hasil capaian kinerja pada sasaran Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang tertangani tahun sebelumnya dan Capaian Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang tertangani tahun sebelumnya dan Tahun 2023

Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2024			Capaian Kinerja Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang tertangani	70%	100%	143%	80%	100%	125%

Berdasarkan tabel 3.5 diatas dapat dilihat Perbandingan Capaian Indikator Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang tertangani Tahun 2024 dengan Capaian Indikator Kinerja tahun 2025 yang mengacu pada Dokumen RPD Kabupaten Bolaaang Mongondow Tahun 2023-2026 yaitu “Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang tertangani” dimana pencapaian tahun 2024 sebesar 100%. Sedangkan tahun 2025 capaian realisasi sebesar 100% tertangani dari target 80%. Capaian kinerja tersebut jika kita nilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori **“SANGAT BERHASIL”**. Kenaikan angka Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang tertangani tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan patroli serta kerjasama yang baik antara pihak TNI dan Polri dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Satpol PP dan Satlinmas yang ada di Desa/Kelurahan perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 5. Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang tertangani tahun sebelumnya dan Tahun 2025



2.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Berikut ini data perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

Tabel 3.7. Realisasi dan Capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Menurunnya angka kriminalitas tindak pidana	576 kasus	491 kasus			-	-	-	-	-	-
Presentasi Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani	-	-	167%	143%	80%	100%	125%	90%	100%	111%

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas, dapat dijelaskan bahwa terjadi perubahan indikator kinerja sejak tahun 2023. Sebelumnya, pada tahun 2021 dan 2022, indikator yang digunakan adalah "Menurunnya angka kriminalitas tindak pidana" dengan capaian berturut-turut sebesar 576 kasus pada tahun 2021 dan 491 kasus pada tahun 2022. Data ini menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus kriminalitas dari tahun ke tahun.

Mulai tahun 2023, sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023–2026, indikator kinerja berganti menjadi “Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani”. Pada tahun 2023, dengan target 60% berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 167%. Tahun 2024, target ditingkatkan menjadi 70% dan kembali terealisasi 100%, menghasilkan capaian 143%. Pada tahun 2025, target berdasarkan Renstra adalah 80%, dan realisasi

kembali mencapai 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 125%.

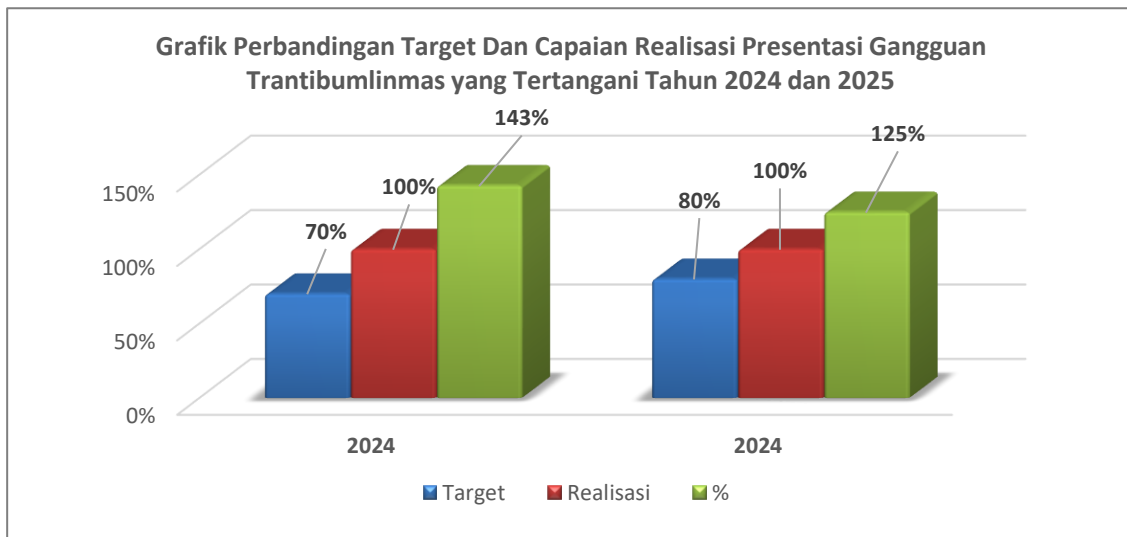
Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Satpol PP Tahun 2023–2026 sebesar 90%, realisasi tahun 2025 sebesar 100% telah melampaui target tersebut dengan capaian 111%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat ditangani secara tuntas.

Dengan konsistensi capaian di atas 100% selama tiga tahun berturut-turut, berdasarkan skala pengukuran kinerja yang digunakan, capaian pada indikator ini termasuk dalam kategori “SANGAT BERHASIL”. Perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun dapat dilihat secara visual pada grafik di bawah ini:

Grafik 6. Realisasi dan Capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra



Grafik 7. Realisasi dan Capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra



2.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.8 Membandingkan Realisasi Kinerja Presentasi Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Indikator	Kabupaten	Provinsi	Nasional
Presentasi Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani Tahun 2025	100%	100%	N/A

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolmong & Satuan Polisi pamong Praja Prov. Sulut

Berdasarkan tabel perbandingan diatas dapat dilihat bahwa capaian Persentasi Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani pada tahun 2025 di Kabupaten Bolaang Mongondow mencapai 100% atau sama dengan Capaian Provinsi Sulawesi utara mencapai 100%. Sedangkan untuk Data nasional tahun 2025 belum tersedia.

2.5 Analisis penyebab keberhasilan alternative solusi yang telah dilakukan

Adapun penyebab keberhasilan atas capaian kinerja Indikator Persentasi Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani pada tahun 2025 adalah:

Faktor Keberhasilan :

Berdasarkan tabel tabel dan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian Persentasi Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani pada pada tahun 2023 menunjukkan kondusifitas daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dari hari kehari semakin baik. Hal ini disebabkan oleh sistem keamanan lingkungan yang terus di tingkatkan mulai dari lingkungan terkecil di tingkatan desa, dan koordinasi yang baik antar tripika di tingkat kecamatan terus

digalakan. Beberapa hal yang mempengaruhi para pelaku dalam melakukan tindakan kriminal dan kekerasan. Faktor ekonomi mungkin yang paling berpengaruh terjadinya tindakan kriminal dan keadaan ini akan semakin parah pada saat tertentu. Selain kondisi diatas, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan kriminal dan kekerasan antara lain sebagai berikut:

1. Pertentangan dan persaingan kebudayaan;
2. Kepadatan dan komposisi penduduk;
3. Perbedaan distribusi kebudayaan;
4. Tingkat pengangguran yang tinggi;
5. Kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat.

Namun selain faktor-faktor di atas tindakan kriminal dan kekerasan dapat terjadi jika ada niat dan kesempatan. Maka tindak kriminal dan kekerasan dapat dilakukan oleh siapa, tidak hanya oleh preman atau perampok, bahkan dapat dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan korban.

2.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan sasaran indikator Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani pada tahun 2025 terdiri atas dua aspek, yaitu efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.

Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi kinerja untuk indikator ini mencapai 100% dari target sebesar 80% (atau 125% dari target). Sementara itu, realisasi anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini, yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum) adalah sebesar Rp116.415.690,00 dari pagu anggaran Rp116.858.538,00 atau 99,62% (berdasarkan data DPPA Perubahan). Namun, berdasarkan data yang disampaikan dalam analisis ini, realisasi anggaran yang digunakan adalah 90,53% dari pagu (dengan asumsi terdapat perbedaan sumber data atau lingkup kegiatan yang lebih luas). Dengan demikian, selisih antara capaian kinerja (100%) dan realisasi anggaran (90,53%) menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 9,47%.

Angka ini mencerminkan bahwa target kinerja yang sangat tinggi (melampaui target Renstra) dapat dicapai dengan penyerapan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia. Hal ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien serta optimalisasi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada dalam menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bolaang Mongondow.

2.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Guna menunjang keberhasilan atas pencapaian sasaran pada indikator Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani pada tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow telah menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp170.731.395,00 dan realisasi sebesar Rp169.768.545,00 atau mencapai 99,44%.
- Kegiatan yang secara langsung mendukung indikator ini adalah Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan) dengan anggaran sebesar Rp116.858.538,00 dan realisasi sebesar Rp116.415.690,00 atau mencapai 99,62%.

Dengan realisasi anggaran yang sangat optimal (di atas 99%) dan capaian kinerja yang melampaui target (100% dari target 80%), menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif dan efisien dalam menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Pengukuran capaian kinerja sasaran; “Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran” dengan indikator sasaran “Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani” dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani	=	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani 27 Kasus}}{\text{Jumlah Kasus Kebakaran 24 Kasus}} \times 100$
--	----------	--

Pada tahun 2025 terjadi 27 kasus kebakaran dan tertangani 24 kasus, sedangkan 3 kasus tidak tertangani karena jarak dan medan sehingga tidak terjangkau.

3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Pada tahun 2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow terjadi 27 kasus kebakaran dimana 17 kasus merupakan kebakaran rumah dan bangunan, sedangkan 10 kasus rescue dan 3 diantaranya tidak dapat tertangani karena jarak tempuh dari Pos Damkar ke Lokasi yang relatif jauh dan memakan waktu. Adapun hasil Capaian kinerja pada indikator

Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9. Perbandingan target dan capaian realisasi kinerja Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani tahun 2025

Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani	80%	88,89%	111,11%	90%	88,89%	98,76%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi pada indikator Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani tahun 2025 terealisasi sebesar 88,89% dari target 80% atau persentasi capaian realisasi mencapai 111,11%. Perbandingan target dan capaian realisasi kinerja Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 8. Perbandingan target dan capaian realisasi kinerja Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani tahun 2025



3.2 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Tabel 3.10. Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Jumlah Armada Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Capaian Realisasi Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani tahun sebelumnya dan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024			Capaian Kinerja Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani	70%	96%	137%	70%	96%	137%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Perbandingan target dengan Hasil Capaian Indikator Kinerja tahun 2024 sebesar 137% dari target 70% terealisasi sebesar 96%. Sedangkan pada tahun 2025 Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani dengan capaian realisasi kinerja sebesar 88,89% dari target kinerja 80% dengan demikian maka persentasi capaian realisasi kinerja dengan target kinerja mencapai 111,11% dan untuk pengukuran kinerja masuk pada kategori **“SANGAT BERHASIL”** hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 9. Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani tahun 2025



3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra pada indikator Jumlah Armada Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Indikator kinerja Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.11. Capaian realisasi dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra pada indicator jumlah armada pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan indicator Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah armada pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	3 unit	4 unit	-	-	-	-	-		-	-
Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani	-	-	155	137%	80%	88,89%	111%	90%	88,89%	98,76%

Sumber Data : Bidang Damkar – Satpol PP Bolmong Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.11 di atas, perlu dijelaskan bahwa terjadi perubahan indikator kinerja sejak tahun 2023. Pada tahun 2021 dan 2022, indikator yang digunakan adalah "Jumlah armada pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran", dengan capaian berturut-turut sebanyak 3 unit pada tahun 2021 dan 4 unit pada tahun 2022. Capaian tahun 2022 mengalami peningkatan signifikan seiring dengan adanya penambahan armada melalui berbagai sumber, termasuk hibah dan bantuan dari pihak ketiga.

Mulai tahun 2023, sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023–2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP, indikator kinerja berganti menjadi “Persentase Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani”. Perubahan ini dilakukan untuk lebih mengukur kualitas pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan, bukan sekadar kuantitas armada yang dimiliki.

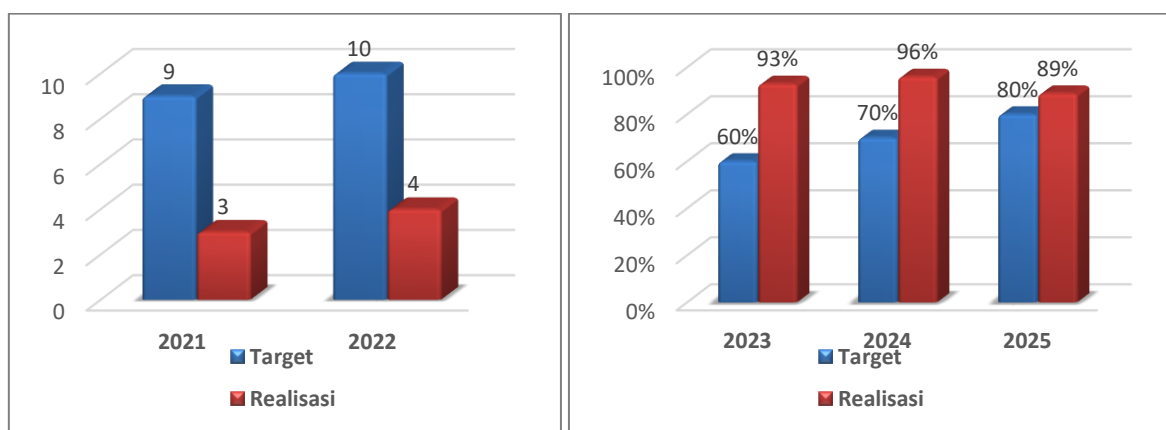
Pada tahun 2023, dengan target 60%, realisasi mencapai 93%, sehingga capaian kinerja adalah 155%. Tahun 2024, target ditingkatkan menjadi 70% dan realisasi mencapai 96%, menghasilkan capaian 137%. Pada tahun 2025, target berdasarkan Renstra adalah 80%, dengan realisasi sebesar 88,89% (24 kejadian tertangani dari total 27 kejadian), sehingga capaian kinerja sebesar 111%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Satpol PP Tahun 2023–2026 sebesar 90%, realisasi tahun 2025 sebesar 88,89% belum sepenuhnya mencapai target akhir, dengan capaian sebesar 98,76%. Hal ini disebabkan oleh adanya satu kejadian

kebakaran yang tidak dapat tertangani karena faktor jarak tempuh dan medan yang sulit dijangkau (sebagaimana tercatat dalam data kejadian kebakaran tahun 2025).

Meskipun demikian, dengan capaian kinerja yang konsisten di atas 100% selama tiga tahun berturut-turut (2023, 2024, dan 2025) jika dibandingkan dengan target tahunan, berdasarkan skala pengukuran kinerja yang digunakan, capaian pada indikator ini termasuk dalam kategori “**SANGAT BERHASIL**”. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya kerja sama lintas daerah dengan Pemerintah Kota Kotamobagu yang memungkinkan pengerahan personel dan unit pemadam kebakaran secara terpadu di wilayah perbatasan. Perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun dapat dilihat secara visual pada grafik di bawah ini.:

Grafik 10. Capaian realisasi dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra pada indikator jumlah armada pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan indikator Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani



3.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.11 Membandingkan realisasi kinerja berdasarkan persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani tahun 2025 dengan Provinsi dan standar nasional

No	Uraian	Kinerja
1	Kabupaten (Bolaang Mongondow)	88,89%
2	Provinsi Sulawesi Utara	N/A
3	Nasional	N/A

Berdasarkan tabel perbandingan diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani di Kabupaten Bolaang Mongondow sampai tahun 2025

capaian kinerja dari target sebesar 80% terealisasi sebesar 88,89% atau capaian 111,11% dari target kinerja dengan 24 kasus/laporan tertangani dari total 27 kasus/laporan kebakaran.

3.5 Analisis penyebab kegagalan dan alternative solusi yang telah dilakukan

Adapun penyebab kegagalan atas capaian kinerja Indikator Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani tahun 2025 Kebakaran adalah:

Persentasi Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani

Faktor Keberhasilan :

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja Jumlah armada Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada tahun 2025 menunjukan bahwa Satpol PP Kabupaten Bolaang Mongondow sangat berhasil mencapai target kinerja hal ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain:

- a. Peningkatan kesiapsiagaan dan koordinasi yang baik antara petugas piket pemadam kebakaran dengan berbagai pihak;
- b. Adanya penambahan Pos Damkar di Kecamatan Passi Timur dan terjalinnya Kerjasama antara Pemerintah Kota Kotamobagu dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- c. Adanya kerjasama dengan Badan Penanggulan Bencana Baerah kabupaten bolaang mongondow dalam sinergitas dalam melakukan penanggulangan bencana secara bersama-sama khususnya untuk bencana kebakaran.

3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi kinerja untuk indikator ini mencapai 88,89% dari target sebesar 80% (atau 111% dari target). Sementara itu, realisasi anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini, yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran) adalah sebesar Rp67.894.530,00 dari pagu anggaran Rp68.674.128,00 atau 98,86%.

Dengan demikian, terdapat selisih antara capaian kinerja (88,89%) dengan realisasi anggaran (98,86%) sebesar -9,97%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran cukup tinggi namun capaian kinerja belum mencapai 100% karena adanya satu kejadian kebakaran yang tidak dapat tertangani akibat faktor jarak dan medan. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan (80%), capaian kinerja telah melampaui target dengan tingkat capaian 111%, sementara realisasi anggaran 98,86% menunjukkan efisiensi

penggunaan anggaran sebesar 12,14% jika diukur dari selisih capaian terhadap target dengan realisasi anggaran.

Ke depan, optimalisasi sumber daya, termasuk peningkatan jumlah armada dan pos pemadam kebakaran di wilayah terpencil, serta penguatan kerja sama lintas daerah, diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja hingga 100% dengan tetap menjaga efisiensi anggaran.

3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Guna menunjang keberhasilan atas pencapaian sasaran pada indikator Persentase Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani pada tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow telah menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp68.674.128,00 dan realisasi sebesar Rp67.894.530,00 atau mencapai 98,86%.
- b. Kegiatan yang secara langsung mendukung indikator ini adalah Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah Rp68.674.128,00 dengan realisasi sebesar Rp67.894.530,00 atau mencapai 98,86%.

Dengan realisasi anggaran yang sangat optimal (98,86%) dan capaian kinerja sebesar 88,89% (24 dari 27 kejadian tertangani), program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan cukup efektif. Capaian ini juga tidak terlepas dari adanya Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Kotamobagu tentang Sinergitas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Wilayah Perbatasan, yang memungkinkan pengerahan personel dan unit pemadam kebakaran secara terpadu, terutama untuk kejadian di wilayah Kecamatan Passi Timur, Bilalang, Passi Barat, dan Lolayan yang berbatasan dengan Kota Kotamobagu.

Ke depan, optimalisasi sumber daya, termasuk peningkatan jumlah armada dan pos pemadam kebakaran di wilayah terpencil, serta penguatan kerja sama lintas daerah, diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja hingga 100% dengan tetap menjaga efisiensi anggaran.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagai bagian tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun Anggaran 2025 memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow, sesuai yang tertuang dalam DPPA-SKPD Tahun 2024. Adapun realisasinya adalah sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi APBD

Anggaran Belanja dari DPPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan sebesar Rp7.355.036.127,00. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan anggaran Tahun 2024 yang sebesar Rp6.616.559.870,00. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan belanja modal untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi Satpol PP serta Damkar.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp6.730.310.262,00 dan terealisasi sebesar Rp6.522.405.079,00 atau mencapai 96,91%. Realisasi belanja operasi ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 93,90%, menunjukkan peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan rutin.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp624.725.865,00 dengan realisasi sebesar Rp207.315.869,00 atau 33,18%. Rendahnya realisasi belanja modal disebabkan oleh beberapa kegiatan pengadaan yang belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan, terutama pembangunan gedung kantor dan pengadaan peralatan tertentu yang prosesnya masih berlangsung hingga akhir tahun anggaran. Meskipun demikian, secara nominal realisasi belanja modal tahun 2025 meningkat signifikan dibanding tahun 2024 yang hanya sebesar Rp107.134.130,00.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran belanja daerah Tahun 2025 mencapai Rp6.729.720.948,00 atau 91,49% dari total pagu anggaran. Capaian ini sedikit lebih rendah dibanding realisasi tahun 2024 yang mencapai 93,99%, namun secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp510.502.508,00.

Perbandingan realisasi anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12. Perbandingan persentase realisasi anggaran tahun 2024 dan tahun 2025

Jenis Belanja	2024			2025		
	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Operasi	6.112.084.310,00	6.112.084.310,00	93,90	6.730.310.262,00	6.522.405.079,00	96,91

Belanja Modal	107.523.000,00	107.134.130,00	99,64	624.725.865,00	207.315.869,00	33,18
Jumlah	6.616.559.870,00	6.219.218.440,00	93,99	7.355.036.127,00	6.729.720.948,00	91,49

Tabel 3.13. Capaian realisasi anggaran belanja tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5	BELANJA DAERAH	7.355.036.127,00	6.729.720.948,00	91,49	6.219.218.440,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.730.310.262,00	6.522.405.079,00	96,91	6.112.084.310,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.993.911.903,00	3.852.032.926,00	96,44	2.621.404.690,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.736.398.359,00	2.670.372.153,00	97,58	3.490.679.620,00
5.2	BELANJA MODAL	624.725.865,00	207.315.869,00	33,18	107.134.130,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	214.725.865,00	197.330.789,00	91,89	32.450.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	410.000.000,00	9.985.080,00	2,43	74.684.130,00
	JUMLAH BELANJA	7.355.036.127,00	6.729.720.948,00	91,49	6.219.218.440,00

Dari Tabel 3.13 di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun Anggaran 2025, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bolaang Mongondow mengalokasikan anggaran belanja daerah sebesar Rp7.355.036.127,00 dengan realisasi mencapai Rp6.729.720.948,00 atau 91,49% dari total anggaran. Realisasi ini secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp510.502.508,00 dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp6.219.218.440,00.

- Belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai serta belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp6.522.405.079,00 atau 96,91% dari anggaran, dengan rincian:
- Belanja pegawai mencapai Rp3.852.032.926,00 (96,44% dari pagu);
- Belanja barang dan jasa mencapai Rp2.670.372.153,00 (97,58% dari pagu).

Capaian belanja operasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan rutin dan operasional Satpol PP berjalan dengan baik sepanjang tahun 2025.

Sementara itu, belanja modal yang dialokasikan sebesar Rp624.725.865,00 terealisasi sebesar Rp207.315.869,00 atau 33,18%. Realisasi ini terdiri dari:

- Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp197.330.789,00 (91,89% dari pagu);
- Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp9.985.080,00 (2,43% dari pagu).

Rendahnya realisasi belanja modal gedung dan bangunan disebabkan oleh kegiatan pembangunan gedung kantor yang baru memasuki tahap perencanaan dan konsultasi pada tahun akhir tahun 2025, sehingga pelaksanaan konstruksi fisik akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Meskipun demikian, realisasi belanja modal peralatan dan mesin menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencapai Rp32.450.000,00..

2. Anggaran dan Realisasi Per Program dan Kegiatan

Secara keseluruhan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 mencapai 91,50% atau sebesar Rp6.729.720.948 dari total pagu Rp7.355.036.127, dengan sisa anggaran Rp625.315.179.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kode 1.05.01) menyerap anggaran terbesar yaitu Rp6.492.057.873 (91,24%) dari pagu Rp7.115.630.604. Dalam program ini, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mencapai realisasi tertinggi secara nominal, yaitu Rp3.905.153.958 (96,77%). Kegiatan Administrasi Kepegawaian dan Penyediaan Jasa Penunjang masing-masing mencatat realisasi 98,05% dan 98,13%, menunjukkan kelancaran administrasi dan dukungan operasional perkantoran. Sementara itu, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mencatat realisasi paling rendah (32,82%) dengan sisa anggaran Rp417.314.536, yang disebabkan oleh proses pengadaan yang belum selesai, terutama terkait pembangunan gedung kantor yang baru memasuki tahap perencanaan.

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (1.05.02) mencapai realisasi 99,44% (Rp169.768.545 dari Rp170.731.395). Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyerap 99,62% dan Penegakan Peraturan Daerah mencapai 99,03%. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam menjaga stabilitas keamanan dan penegakan peraturan daerah.

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (1.05.04) terealisasi 98,86% (Rp67.894.530 dari Rp68.674.128). Kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran berjalan sesuai rencana, didukung oleh kerja sama lintas daerah dengan Pemerintah Kota Kotamobagu.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran tahun 2025 tergolong baik, dengan sebagian besar program dan kegiatan mencapai serapan di atas 94%, kecuali pada belanja modal pengadaan yang masih terkendala waktu. Sisa anggaran terbesar berada

pada kegiatan pengadaan barang milik daerah, yang akan menjadi perhatian untuk percepatan pelaksanaan di tahun mendatang.

Capaian kinerja realisasi anggaran untuk masing-masing program/kegiatan ditunjukkan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp.)
			(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	$5 = (4/3 * 100)$	$6 = 3 - 4$
	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.355.036.127	6.729.720.948	91,50%	625.315.179
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.115.630.604	6.492.057.873	91,24%	623.572.731
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.035.479.543	3.905.153.958	96,77%	130.325.585
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.309.750	50.307.420	98,05%	1.002.330
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	627.251.940	593.859.940	94,68%	33.392.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	621.146.115	203.831.579	32,82%	417.314.536
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.558.500.000	1.529.375.000	98,13%	29.125.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.943.256	209.529.976	94,41%	12.413.280
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	170.731.395	169.768.545	99,44%	962.850
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	116.858.538	116.415.690	99,62%	442.848
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	53.872.857	53.352.855	99,03%	520.002
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	68.674.128	67.894.530	98,86%	779.598
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	68.674.128	67.894.530	98,86%	779.598
	Jumlah	7.355.036.127	6.729.720.948	91,50%	625.315.179

3. Permasalahan dan Solusi

3.1 Permasalahan

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari realisasi anggaran yang mencapai 91,49% (Rp6.729.720.948 dari pagu Rp7.355.036.127) serta capaian kinerja yang sangat memuaskan pada sebagian besar indikator sasaran. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

▪ Gedung Kantor

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja hingga saat ini masih menempati ruangan pinjam pakai dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Kondisi ini mengakibatkan ruang kerja yang tersedia tidak memadai, baik dari segi luas maupun tata ruang, sehingga kurang kondusif untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran dan koordinasi antar bidang. Pembangunan gedung kantor baru yang telah dianggarkan pada tahun 2025 baru mencapai tahap perencanaan dan konsultasi (realisasi belanja modal gedung hanya 2,43%), sehingga pembangunan fisik belum dapat dilaksanakan.

▪ Sarana Operasional Lapangan

Ketersediaan kendaraan operasional roda empat dan roda dua masih terbatas, sementara usia pakai beberapa unit sudah tua. Hal ini berdampak pada mobilitas personel dalam merespons gangguan ketertiban dan kejadian kebakaran, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota. Selain itu, perlengkapan pemadam kebakaran seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan rescue juga perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya sesuai standar nasional.

▪ Pos Pemadam Kebakaran

Belum tersedianya pos pemadam kebakaran di beberapa Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang strategis menyebabkan waktu tanggap (respon time) di beberapa kecamatan melebihi standar 15 menit, sebagaimana terjadi pada satu kejadian kebakaran tahun 2025 yang tidak dapat tertangani karena jarak tempuh dan medan yang sulit.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

▪ Kuantitas Personel

Meskipun telah ada penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 36 orang dan tenaga kontrak, rasio jumlah personel terhadap luas wilayah dan jumlah penduduk masih belum ideal untuk pelaksanaan tugas secara optimal, terutama untuk personel di lapangan yang melaksanakan patroli, penegakan Perda, dan pemadaman kebakaran.

▪ Kualitas dan Kompetensi

Belum meratanya kompetensi teknis personel, khususnya di bidang pemadaman kebakaran (rescue dan evakuasi), penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan dan pengaduan masyarakat. Jumlah PPNS yang aktif juga masih sangat terbatas.

c. Keterbatasan Anggaran

Pagu anggaran yang tersedia setiap tahun masih belum sepenuhnya mencukupi untuk mengakomodir seluruh program dan kegiatan yang direncanakan, terutama yang bersifat prioritas dan berkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sebagai salah satu dari 6 (enam) OPD yang memiliki SPM, Satpol PP memerlukan dukungan anggaran yang memadai untuk memenuhi target RPJMN. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada optimalisasi pelaksanaan patroli, sosialisasi Perda, pelatihan personel, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

d. Inovasi Layanan yang Belum Optimal

Inovasi dalam pelayanan, khususnya yang berbasis teknologi informasi seperti sistem pengaduan masyarakat terpadu dan dashboard monitoring kejadian secara real-time, masih perlu dikembangkan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana pendukung serta sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi.

3.2 Solusi

Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta meningkatkan kualitas pelayanan ke depan, beberapa solusi yang dapat diusulkan antara lain:

a. Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana

- Melanjutkan dan mempercepat pembangunan gedung kantor yang representatif dan dirancang khusus sesuai kebutuhan Satpol PP, dengan target penyelesaian pembangunan fisik pada tahun anggaran berikutnya.
- Melakukan pengadaan kendaraan operasional baru (roda empat dan roda dua) serta peremajaan kendaraan yang sudah tua untuk meningkatkan mobilitas personel dalam pelaksanaan tugas lapangan.
- Menambah perlengkapan pemadam kebakaran dan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar teknis nasional.
- Membangun pos pemadam kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran yang belum terlayani, terutama di kecamatan yang memiliki jarak tempuh jauh dari pusat kota.
- Mengoptimalkan dan memperluas kerja sama lintas daerah dengan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk saling mendukung dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan.

b. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM

- Mengusulkan penambahan formasi personel ASN, terutama untuk jabatan fungsional PPNS, baik melalui rekrutmen baru maupun mutasi dari instansi lain.
- Mengikutsertakan personel Satpol PP secara berkelanjutan dalam pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat (Bandiklat), provinsi, maupun lembaga pelatihan lainnya. Pelatihan difokuskan pada bidang teknis pemadaman kebakaran (rescue dan evakuasi), penanganan gangguan ketertiban, penyidikan PPNS, serta penguasaan teknologi informasi.
- Mendorong personel yang memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat PPNS guna memperkuat kapasitas penegakan hukum daerah.
- Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk meningkatkan profesionalisme dan disiplin personel.

c. Optimalisasi dan Peningkatan Pagu Anggaran

- Menyusun usulan kebutuhan anggaran secara lebih terukur dan berbasis prioritas, dengan mengacu pada Renstra 2025–2029, target IKU, dan pemenuhan SPM. Usulan penambahan pagu anggaran disampaikan secara berkelanjutan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui pembahasan KUA-PPAS setiap tahunnya.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang ada, serta mengoptimalkan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, termasuk kemitraan dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

d. Pengembangan Inovasi Layanan

- Mengembangkan sistem informasi dan pengaduan masyarakat terpadu berbasis teknologi digital, termasuk dashboard monitoring kejadian secara real-time, untuk meningkatkan transparansi, kecepatan respons, dan akuntabilitas layanan.
- Meningkatkan kompetensi personel di bidang teknologi informasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
- Membangun sinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam pengembangan sistem informasi.

Dengan mengidentifikasi permasalahan secara lebih spesifik dan merumuskan solusi yang terarah, diharapkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow dapat terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib, dan aman.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) merupakan pertanggungjawaban serta sarana penyampaian informasi tentang sejauh mana capaian kinerja tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maupun di dalam RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow 2023-2026 yang diamanahkan masyarakat, stakeholder, dan pimpinan di atasnya.

A. TINJAUAN UMUM

Berdasarkan capaian kinerja organisasi yang diuraikan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 mencapai hasil yang sangat memuaskan. Ketiga sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2023–2026 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berhasil dicapai dengan predikat **“SANGAT BERHASIL”**.

Pada **Sasaran 1**: Meningkatnya Penegakan Peraturan Perda dengan indikator **“Persentase Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang Ditindaklanjuti”**, dari target Renstra sebesar 80% berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 125%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pelanggaran Perda/Perkada yang terjadi dapat ditindaklanjuti secara tuntas.

Pada **Sasaran 2**: Meningkatnya Peran Satlinmas dalam Penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator **“Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang Tertangani”**, dari target Renstra sebesar 80% berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 125%. Hal ini menegaskan bahwa seluruh gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow selama tahun 2025 dapat ditangani dengan baik.

Pada **Sasaran 3**: Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan indikator **“Persentase Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani”**, dari target Renstra sebesar 80% berhasil direalisasikan sebesar 88,89% (24 dari 27 kejadian), sehingga persentase capaian kinerja mencapai 111%. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat satu kejadian yang tidak dapat tertangani karena faktor jarak dan medan, secara umum layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan berjalan sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan.

Dengan demikian, berdasarkan skala pengukuran kinerja yang digunakan, ketiga sasaran tersebut masuk dalam kategori **“SANGAT BERHASIL”**.

Adapun realisasi penyerapan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp6.729.720.948,00 atau 91,49% dari total pagu anggaran sebesar Rp7.355.036.127,00. Realisasi Belanja Operasi mencapai 96,91%, sementara realisasi Belanja Modal mencapai 33,18%. Rendahnya realisasi belanja modal, khususnya untuk gedung dan bangunan (2,43%), disebabkan oleh kegiatan pembangunan gedung kantor yang baru mulai memasuki tahap perencanaan dan konsultasi pada triwulan 4 tahun 2025, sehingga pelaksanaan konstruksi fisik terlambat dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2025 ini menjadi modal berharga bagi peningkatan kinerja di masa mendatang, dengan tetap memperhatikan upaya perbaikan dan inovasi layanan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib, dan aman di Kabupaten Bolaang Mongondow.

B. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHANNYA

Secara keseluruhan, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 berada pada kategori **"SANGAT BERHASIL"**. Keberhasilan ini tercermin dari realisasi kinerja yang melampaui target pada sebagian besar indikator sasaran strategis, serta pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Namun demikian, capaian yang membanggakan ini tidak serta-merta menjadikan kita berpuas diri. Sebaliknya, setiap permasalahan dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2025—seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, rendahnya realisasi belanja modal gedung dan bangunan, serta masih adanya kejadian kebakaran yang tidak tertangani akibat kendala geografis—menjadi motivasi dan bahan evaluasi yang berharga bagi perbaikan kinerja dan pencapaian sasaran di tahun-tahun mendatang.

Dengan dilakukannya langkah-langkah perbaikan berkelanjutan atas perencanaan dan pelaksanaan kinerja, optimalisasi penggunaan anggaran, serta upaya peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, diharapkan ke depan seluruh sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja maupun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara optimal. Hal ini sejalan dengan komitmen Satpol PP untuk terus meningkatkan profesionalisme, responsivitas, dan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib, dan

aman di Kabupaten Bolaang Mongondow.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak

**PENEGAKKAN PERDA/PERKADA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025**

No	Nama Kegiatan / Penertiban	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Peraturan yang Dilanggar (Pasal)	Keterangan
1.	Penertiban dan pengawasan aktivitas perdagangan di Pasar Lolak	28 Februari 2025	Pasar Lolak, Kec. Lolak	• Pasal 4 huruf c Perda No. 3/2023 (menggunakan fasilitas umum tidak sesuai peruntukan) • Pasal 18 Perda No. 3/2023 (berjualan di tempat umum tanpa izin)	Terlaksana; dilakukan pembinaan dan penataan pedagang agar tidak melanggar ketentuan.
2.	Penyuluhan ketertiban dan penataan pedagang Pasar Ibolian	18 Maret 2025	Pasar Ibolian, Kec. Dumoga Tengah	• Pasal 13 ayat (1) huruf d Perda No. 3/2023 (berdagang di taman/jalur hijau) • Pasal 16 ayat (1) Perda No. 3/2023 (pemanfaatan jalan tidak sesuai peruntukan)	Terlaksana; kegiatan bersifat preventif dan edukatif.
3.	Penertiban pedagang dan penataan area perdagangan Pasar Inobonto	12 Juni 2025	Pasar Inobonto, Kec. Bolaang	• Pasal 13 ayat (1) huruf d Perda No. 3/2023 • Pasal 19 huruf m Perda No. 3/2023 (berjualan secara terbuka atau mendirikan tenda di jalan)	Terlaksana; dilakukan penertiban lapak liar dan pengaturan zona pedagang.
4.	Penertiban dan pengamanan aset daerah (perumahan pemerintah di belakang Paris)	20 Januari 2025	Kel. Paris, Kec. Kotamobagu Barat	• Pasal 7 ayat (4) Perda No. 3/2023 (mendirikan bangunan di atas tanah milik pemerintah tanpa izin) • Pasal 4 huruf a Perda No. 3/2023 (menempati fasilitas umum untuk tempat tinggal)	Terlaksana; dilakukan pengamanan aset dan pembinaan terhadap penghuni liar.

5.	Penertiban dan pengamanan aset daerah (Rumah Dinas Dokter)	15 April 2025	Kel. Kotabangon, Kec. Kotamobagu Timur	• Pasal 7 ayat (4) Perda No. 3/2023	Terlaksana; aset berhasil diamankan dan dikembalikan fungsinya.
6.	Penertiban dan pengamanan aset daerah (Rumah Dinas Puskesmas Pembantu)	08 Juli 2025	Desa Lalow, Kec. Lolak	• Pasal 7 ayat (4) Perda No. 3/2023	Terlaksana; dilakukan inventarisasi dan pengamanan aset.
7.	Penertiban dan pengamanan aset daerah (tanah dan bangunan di Kel. Bitung Karangria)	10 September 2025	Kel. Bitung Karangria, Kec. Tuminting, Kota Manado	• Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik daerah (aset lintas daerah)	Terlaksana; koordinasi dengan Pemkot Manado untuk pengamanan aset milik Pemkab Bolmong.

Lolak, 28 Februari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



ZULFADLI BINOL, SE. ME
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19691011 200701 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak

**DATA GANGGUAN TRANTIBUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025**

N o	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Jenis Pengaduan	Nama Korban & Umur	Nama Pelaku & Umur	Tindak Lanjut	Status Pengaduan
1	Kepolisian Resor Bolmong	30 Januari 2025	30 Januari 2025 (pukul 07.30 WITA)	Desa Dumoga dan Desa Modomang, Kecamatan Dumoga Timur	Konflik sosial / kekerasan / keamanan umum (Bentrokan antarwarga berujung penembakan aparat)	Bripda Mohamad Daffa Pratama Abdjul (23 tahun)	Frenli Feri Pontoh (37), Richo Nofdi Simbala (29)	Pelaku ditangkap dan ditahan	Selesai (P21)
2	Kepolisian Resor Bolmong	2025	2025	Desa Lolayan, perbatasan Bolmong - Kotamobagu	Kekerasan berat / gangguan keamanan masyarakat (Penganiayaan massal menggunakan senjata tajam)	12 orang warga (identitas dan umur tidak dirinci)	IM (24)	Pelaku ditangkap	Dalam proses penyidikan
3	Kepolisian Resor Bolmong	27 Maret 2025	27 Maret 2025 (Press Release)	Beberapa lokasi: Dinkes Bolmong, Desa Toruakat, Desa Cempaka, Desa Pusian, Desa Tadoy (Bolmong), dan Desa Atoga (Boltim)	Kejahatan terhadap harta benda (Pencurian dengan pemberatan/Curat dan Curanik)	Instansi Pemerintah (Dinkes Bolmong) dan warga pemilik 4 unit motor & 2 ekor kambing	Jufry Rolobes sy alias Ale (47), Marfin Takaliwang alias Aping (21), Eman Palutungan alias Eman (31)	Pelaku ditahan	Selesai (P21)

4	Masyarakat Kec. Sangtombolang	8 Mei 2025	8 Mei 2025 (pukul 04.00 WITA)	Depan Mapolsek Sangtombolang, Kecamatan Sangtombolang	Pelanggaran ketertiban umum / penyakit masyarakat (Peredaran miras ilegal Cap Tikus antarprovinisi)	Tidak ada korban jiwa (kerugian sosial)	HM (50), sopir truk asal Minahasa Selatan	Pelaku diamankan, barang bukti disita, proses hukum	Dalam proses penyidikan
5	Kepolisian Resor Bolmong	Mei 2025	Mei - September 2025	Seluruh wilayah Kabupaten Bolmong	Potensi gangguan trantibum (Premanisme, sajam, miras, judi) - Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD)	Tidak ada (kegiatan preventif)	Tidak spesifik (sasaran operasi: preman, pengedar miras, pembawa sajam)	Patroli rutin, razia, pencegahan	Selesai (kegiatan berkelanjutan)
6	Masyarakat Desa Babo	22 Agustus 2025	22 Agustus 2025 (siang hari)	Desa Babo, Kecamatan Sangtombolang	Narkotika / gangguan sosial serius (Jaringan narkoba lintas provinsi)	Masyarakat umum (target peredaran di Bitung)	Moh Aryanto alias Ary (28), Novaldi Langgai alias Noval (31)	Pelaku ditahan, barang bukti disita, pengembangan jaringan	Dalam proses penyidikan (pengembangan ke jaringan Bali)
7	Keluarga Korban / Warga	12-Nov-25	12 November 2025 (sebelum penangkapan pukul 08.30 WITA)	Rumah kos di Kec. Tikala, Manado (TKP); Pasar Ibolian, Dumoga Tengah (lokasi penangkapan)	Kejahatan terhadap anak / moral & sosial (Persetubuhan anak di bawah umur oleh residivis)	Anak di bawah umur (identitas dilindungi undang-undang)	AK (24), residivis kasus pembunuhan (2017) dan tabrak lari	Pelaku diamankan tanpa perlawanan	Dalam proses penyidikan
8	Pemerintah Kab. Bolmong / Warga	Nov-25	Nov-25	Perkebunan Obay, Desa Pusian Barat, Kecamatan Dumoga Timur	Konflik sosial & ketertiban wilayah (Tambang Emas Ilegal/PETI yang memicu gangguan)	Masyarakat sekitar tambang (potensi konflik lahan)	GL (pengusaha PETI, umur tidak dirinci) dan pihak pengelola tamban	Penetapan tersangka, rapat Forkopimda, pendataan	Dalam proses (penertiban)

							g ilegal lainnya		
9	Masyarakat / Korban	Desember 2025	Desember 2025	Wilayah Kabupaten Bolmong	Gangguan ketertiban sosial & hukum (Penyalahgunaan data pribadi oleh ASN)	SCM (40)	RL (47), ASN aktif di lingkungan Pemkab Bolmong	Tersangka ditetapkan	Dalam proses penyidikan

Lolak, 28 Februari 2026


**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

ZULFADLI BINOL, SE. ME
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19691011 200701 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak

**PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025**

No	Nama Korban	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Jarak Tempuh	Waktu Menerima Laporan	Waktu Tiba Di Lokasi Kejadian	Respon Time	Ket
1	Kel.Ika Sanny	Desa Pusian	02 Januari 2025	Kebakaran Rumah	37 Km	00.17	00.55	5 Menit	Pos Damkar Passi Timur
2	Kel.Hengky Ratu-Mokolintad	Desa Poopo	23 Januari 2025	Kejadian tanah Longsor Dan Resque	4 Km	9,52		5 Menit	Pos Damkar Passi Timur
3	Kel.Silvanus Lagunaung-Tambayong	Desa poopo	29 Januari 2025	Penanganan Hewan Liar	4 Km	15,49	15,54	5 Menit	Pos Damkar Passi Timur
4	Bpk Vaani Watung Ibu Nur Utomo Ester Watung Nova Watung	Desa Dondomon	12-Apr-25	Kebakaran rumah	60 Km	16.30			Tidak Terjangkau
5	Bpk Ade Tooleng (Alm) Ibu Syane Lenak	Kelurahan Imandi	18-Apr-25	Kebakaran Rumah	45 Km	16.20			Tidak Terjangkau
6	Bpk Sandry Mamonto	Desa Bakan	10 Mei 2025	Kebakaran Rumah	75 Km	09.00			Tidak Terjangkau

7	Bpk Subandi Umar Ibu Jufita Rifai	Desa Doloduo	06 Juni 2025	Kebakaran Rumah	20 Km	19.15	19.36	21 Menit	Pos Damkar Passi Timur
8	Bpk Mochtar Umar Ibu Ruki Yasin	Desa Doloduo	07 Juli 2025	Kebakaran Rumah	20 Km	01.00	01.30	30 Menit	Pos Damkar Passi Timur
9	Bpk Masri Laures Tabo Ibu Putri Bonde	Desa Doloduo Induk	09 Juli 2025	Tabung Gas Bocor	20 Km	10.20	10.46	26 Menit	Kejadian Pos Damkar Passi Timur
10	Zulfikar Aringking	Desa Pangian	13 Juli 2025	Pelepasan Satu Buah Cincin		11.04			Damkar Passi Timur dan Damkar Kotamobagu
11	Karhutla	Jln. Trans Sulawesi Desa Solog	24 Juli 2025	Kebakaran Lahan		20.30	20.45	15 Menit	Gabungan Bpbd, Satpol Pp Damkar, Tni Dan Polri
12	Adriani Etu Mokodompit	Desa Bulud	26 Juli 2025	Kebakaran Gudang Pupuk	15 Km	19.30	19.52	22 Menit	Pos Damkar Passi Timur
13	Pasar Tradisional Lolak	Pasar Lolak, Desa Lolak, Kec. Lolak	27 Juli 2025	Kebakaran Pasar Tradisional Lolak		23.49	23.59		Anggota Gabungan Bpbd, Satpol Pp Damkar, Tni Dan Polri
14	Karhutla	Jln Trans Sulawesi, Desa Inobonto	29 Juli 2025	Kebakaran Lahan		13.00	13.30	30 Menit	Gabungan BPBD, SATPOL PP DAMKAR, TNI DAN POLRI
15	Markus Maningkas	Desa Ponompian	30 Juli 2025	Kebakaran Rumah	10 Km	10.30	10.45	15 Menit	Pos Damkar Dumoga
16	Kiki	Desa Mopait Kec. Lolayan	19 Agustus 2025	Rescue Kecelakaan	10 Km	12.55	13.10	15 Menit	Pos Damkar Dumoga

17	Rahimin Abdullah	Kel. Gogagoman Kec. Kotamobagu Barat	21 Agustus 2025	Kebakaran Rumah	7,3 Km	23.40	23.50	10 Menit	Pos Damkar Passi dan Damkar Kotamobagu
18	Markus Maningkas	Desa Ponompian	02-Sep-25	Kebakaran Rumah	10 Km	02.45	02.59	14 Menit	Pos Damkar Dumoga
19	Iswadi Hanse	Desa Pangi Induk Kec. Sangtombolang	23-Sep-25	Kebakaran Rumah	47 Km	13.15	14.30	75 Menit	Pos Damkar Dumoga
20	TIDAK BERPENGHUNI	Desa Tapaaog, Kec,Lolayan	15 Oktober 2025	Pencegahan	20 Km	07:40	08:00	20 Menit	Pos Damkar Passi Timur
21	Kel. Afandi Paputungan Kel. Ustad Taufik Kel. Thalib Paputungan Kel. Hamza Pakudu	Tadoy Induk, Kec. Bolaang Timur	19 Oktober 2025	Kebakaran Rumah Warga dan Mushola	25 km	14:21	14:45	24 Menit	Gabungan BPBD, SATPOL PP DAMKAR, TNI DAN POLRI
22	Kel. Lole andre moningka - porayow	Kel. Tumubui Kec. Kotamobagu Timur	13-Nov-25	Pencegahan	7,2 Km	23.00	23.15	15 Menit	Pos Damkar Passi bekerja sama dengan Damkar Kotamobagu
23	Kel. Raymond G. Wasik	Kel. Biga Kec. Kotamobagu Utara	25-Nov-25	Pencegahan	5.5 Km	13:59	14:14	15 Menit	Pos Damkar Passi bekerja sama dengan Damkar Kotamobagu
24	Kel. Mira Dondo	Kel. Upai Kec. Kotamobagu Utara	1 Desember 2025	Pencegahan	4 Km	08:50	09:00	10 Menit	Pos Damkar Passi bekerja sama dengan Damkar Kotamobagu
25	Kel. Yusael Kolopita	Desa Siniung Induk Dusun 5	1 Desember 2025	Kebakaran Rumah	5 Km	04:30	04:34	4 Menit	Pos Damkar Dumoga

26	Herianto Hermanus	Desa Poopo Barat Kec. Passi Timur	08 Desember 2025	Penanganan Sarang Lebah					Pos Damak Passi Timur
27	Samin Mokoginta	Bilalang 3 utara Kec. Bilalang	18-Dec-25	Penanganan Kebakaran Gudang somil	3,9 Km	23:40	23:50	10 Menit	Pos Damkar Passi Timur

Lolak, 28 Februari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



ZULFADLI BINOL, SE. ME
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19691011 200701 1 016